

## PENGARUH BELANJA DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Mutiatul Jannah<sup>1</sup>, Kurniawansyah<sup>2</sup>, Ismawati<sup>3\*</sup>

<sup>123</sup>Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: [ismafem81@gmail.com](mailto:ismafem81@gmail.com)

Article Info	Abstrak
<b>Article History</b> Received: 19 Desember 2022 Revised: 24 Desember 2022 Published: 31 Desember 2022	<i>This study aims to determine the effect of regional spending on economic growth in West Sumbawa Regency. This type of research is explanatory research conducted to examine the relationship or influence of the variables studied, namely regional spending on regional economic growth in West Sumbawa Regency. The type of data used is quantitative data in the form of capital expenditure data and economic growth for West Sumbawa Regency for 2012-2021 obtained from documents and archives that have been published by the West Sumbawa Regency Central Bureau of Statistics (BPS). All data that has been collected was processed using the SPSS application to be analyzed using simple linear regression analysis techniques, partial hypothesis testing (t test), and determination coefficient test (<math>R^2</math>). The conclusion drawn from this study is that regional spending has a positive and significant effect on regional economic growth in West Sumbawa Regency. the ability of regional expenditure variables to influence variations in changes in regional economic growth variables in West Sumbawa Regency is 25.9%, while the remaining 74.1% is influenced by other variables beyond the scope of this study.</i>
<b>Keywords</b> Regional Expenditure; Economic Growth; Gross Regional Domestic Product.	

### PENDAHULUAN

Pembangunan Ekonomi merupakan sebuah rangkaian usaha dan kebijaksanaan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengembangkan lapangan pekerjaan, meratakan pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan merubah struktur kegiatan ekonomi yang awalnya dari sektor primer diubah ke sektor sekunder dan tersier (Hasan dan Azis, 2018). Pembangunan ekonomi sendiri sangat diperlukan suatu negara dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di suatu negara, dengan mengembangkan semua bidang kegiatan yang dimiliki negar tersebut. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukanlah pertumbuhan ekonomi yang berkembang dan distribusi pendapatan yang merata.

Di seluruh dunia, baik negara maju maupun berkembang senantiasa memperhatikan pembangunan dalam negaranya. Unsur pembangunan tersebut yang mendukung kemajuan dari sebuah negara di antaranya adalah sumber daya manusia. Jika suatu negara yang kaya akan sumber daya alam tetapi minim sumber daya manusia, maka akan sulit untuk memajukan negaranya tetapi sumber daya manusia yang baik tentunya akan dapat mengelolah kekayaan yang dimiliki suatu negara dengan baik pula. Sebagaimana tujuan pembangunan manusia adalah menciptakan suatu lingkungan yang kondusif dan mendukung manusia agar dapat menikmati hidup yang lama, sehat dan kreatif (Sukirno, 2018).

Pertumbuhan ekonomi pada hakekatnya adalah suatu acuan untuk mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan ekonomi bukanlah suatu hal yang selalu berkembang secara linier. Adakalanya perkembangan perekonomian pesat dan adakalanya berjalan lambat

yang berarti tingkat kegiatannya lebih rendah dari masa sebelumnya. Salah satu indikator keberhasilan daerah dalam kesejahteraan masyarakatnya adalah dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan PDRB dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selalu menjadi salah satu hal yang ingin dicapai oleh semua negara maupun daerah.

Mengenai kewajiban daerah dalam APBD yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pendanaan terhadap fasilitas-fasilitas umum yang digunakan oleh masyarakat berhubungan langsung dengan berapa besar jumlah belanja pemerintah yang dialokasikan untuk meningkatkan fasilitas umum yang diperlukan. Semakin besar jumlah belanja pemerintah untuk bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi maka semakin besar pula dana pembangunan maka akan semakin baik pula kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik (Fatimah dan Hasbullah, 2020).

Dalam perencanaan pembangunan manusia yang dilakukan suatu daerah pastinya memerlukan dukungan terutama dari pemerintah. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui alokasi anggaran di sektor-sektor yang menunjang pembangunan manusia, diantaranya sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Saat ini pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur keuangannya sendiri salah satunya adalah kewenangan dalam mengatur APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

APBD merupakan salah satu instrument kebijakan pemerintah daerah yang didalamnya selain mencakup sumber-sumber pendapatan daerah tetapi juga berbagai belanja pemerintah termasuk belanja bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang ekonomi. Belanja pemerintah memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi alokasi dan fungsi redistribusi yang salah satu fungsinya yaitu alokasi untuk memenuhi permintaan masyarakat terhadap tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta.

APBD disusun oleh suatu daerah untuk meningkatkan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan adanya APBD, maka suatu daerah dapat memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, lalu membelanjakan dana tersebut sesuai program dan kegiatan yang telah ditentukan dalam peraturan daerah setempat. Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sedangkan belanja dilakukan oleh daerah dalam bentuk belanja daerah (Putri, *et al.*, 2021).

Agar dapat mendorong terciptanya sebuah pertumbuhan ekonomi daerah yang kondusif salah satu komponen yang diandalkan adalah dengan belanja daerah. Belanja Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang telah ditetapkan berdasarkan aturan perundang-undangan.

Abdul Halim (2016) berpendapat bahwa belanja daerah adalah sebuah kewajiban pemerintah untuk mengurangi nilai kekayaan bersih. Sedangkan menurut Sarwenda Biduri (2021) memberikan pernyataan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang dapat diakuisebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah. Belanja daerah juga dikelompokkan ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Pengeluaran pemerintah daerah diukur dari total belanja rutin dan belanja pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Pengeluaran pemerintah berkaitan erat dengan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) karena secara langsung akan mempengaruhi penerimaan daerah dan pembiayaan daerah, sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung. Semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang produktif, maka semakin memperbesar tingkat perekonomian di suatu daerah (Ayumiati, 2017).

Pertumbuhan ekonomi terkait erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk daerah. Dalam hal ini perekonomian dikatakan tumbuh dan berkembang bila ada pertumbuhan *output*. Pertumbuhan ekonomi daerah ini dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan ekonomi yang pada akhirnya memberikan peningkatan output pada daerah Sumbawa Barat. Belanja pemerintah ini dapat mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, belanja pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Belanja pemerintah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (UU Nomor 32 Tahun 2004).

Dalam prioritas belanja, peningkatan pembangunan manusia akan meningkatkan pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan manusia dapat dicermati dari besar kecilnya IPM. Apabila IPM mengalami peningkatan, maka dapat diduga bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan mengalami peningkatan. Jika tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat, pada gilirannya penduduk miskin menjadi semakin berkurang baik dari segi jumlah maupun kualitasnya (Putra, *et al.*, 2017).

Belanja ekonomi telah berkontribusi positif dalam mendorong pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi, belanja kesehatan berkontribusi pada pembangunan manusia, belanja pendidikan berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, namun memiliki dampak yang tidak signifikan terhadap pembangunan manusia. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia (Tjodi, *et al.*, 2018).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan guna mempercepat perubahan struktur perekonomian daerah menuju perekonomian yang berimbang dan dinamis yang bercirikan industri yang kuat dan maju, pertanian yang tangguh serta memiliki basis pertumbuhan sektoral yang seimbang. Pertumbuhan ekonomi juga diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan di bidang-bidang lainnya sekaligus sebagai kekuatan utama pembangunan dalam rangka meningkatkan dan mengatasi ketimpangan ekonomi. Upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerah telah dilaksanakan dalam bentuk pemberian subsidi dan bantuan serta insentif pajak bagi daerah-daerah terbelakang. Sebagaimana kebijakan dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat dalam kegiatan pembangunan ekonomi baik yang sudah dicapai maupun yang masih dalam proses, maka peran yang dilakukan pemerintah dalam perekonomian adalah memberikan stimulan dan lebih mendorong tumbuhnya perekonomian rakyat.

Salah satu upaya daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah adalah dengan meningkatkan

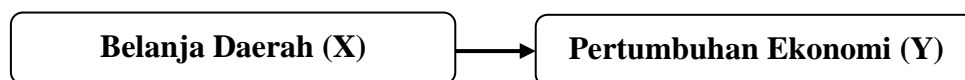
belanja-belanja pada sektor-sektor pembangunan. Belanja ini dapat tercermin dari belanja modal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Dengan peningkatan belanja modal ini, maka diharapkan dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja tersebut digunakan untuk memberdayakan berbagai sumber ekonomi untuk mendorong pemerataan dan peningkatan pendapatan per kapita. Belanja modal juga merupakan salah satu input produksi yang menghasilkan *output*.

Kembali pada permasalahan yang sering muncul terkait dengan kualitas belanja daerah adalah rendahnya kualitas perencanaan daerah. Faktor yang mempengaruhi kualitas belanja daerah antara lain SDM, SDA, faktor kebijakan, dan komitmen dari pemerintah daerah itu sendiri untuk memprioritaskan kepentingan publik terutama yang berkaitan dengan pembangunan manusia. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa dalam merumuskan kebijakan pembangunan di masa yang akan datang.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatory, yaitu penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian melalui pengujian hipotesis (Singarimbun & Effendi, 2015). Melalui penelitian ini dapat dijelaskan hubungan dan pengaruh dari variabel-variabel yang diteliti, yaitu belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Adapun desain penelitian ini disajikan dalam gambar berikut ini.



**Gambar 1. Desain Penelitian**

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018), data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Data kuantitatif pada penelitian ini berupa data belanja modal dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2012-2021.

Data pada penelitian ini diperoleh dari sumber sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Sanusi, 2017). Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari dokumen dan arsip yang terdapat pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa Barat ataupun yang sudah dipublikasikan.

### Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik dokumentasi. Menurut Arikunto (2017), teknik dokumentasi adalah teknik mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Teknik dokumentasi pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen dan arsip yang terkait permasalahan penelitian, yaitu data belanja modal dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2012-2021 yang diperoleh dari dokumen dan arsip yang terdapat pada

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa Barat ataupun yang sudah dipublikasikan.

### Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis regresi linear sederhana. Teknik analisis ini dimaksud untuk mengetahui pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2012-2021. Selain itu, dilakukan pula pengujian hipotesis parsial (uji t), dan uji koefisien determinan ( $R^2$ ) (Ghozali, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi sederhana dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh belanja daerah (X) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Y). Berdasarkan hasil pengujian koefisien regresi dengan bantuan aplikasi SPSS, diperoleh hasil yang disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 1. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Sederhana**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	772.854	185.894		4.158	.000
Belanja Daerah	.804	.257	.509	3.127	.004

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Output SPSS 16.0 (data diolah), 2022.

Berdasarkan tabel tersebut, maka persamaan regresi linear sederhana pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X + e$$

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = 772.854 + 0.804 (\text{Belanja Daerah}) + e$$

Persamaan regresi linear sederhana pada penelitian ini dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Nilai constanta (a) sebesar 772.854, hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel belanja daerah (X) bernilai konstan (0), maka nilai konsisten pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebesar 772.854.
- Nilai  $\beta$  adalah sebesar 0.804 dan bernilai positif. Nilai positif menunjukkan hubungan searah. Artinya, jika nilai variabel belanja daerah (X) mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Y) juga akan mengalami peningkatan sebesar 0.804, demikian pula sebaliknya.

### 2. Uji Hipotesis Parameter Parsial (Uji-t)

Uji-t pada penelitian ini digunakan untuk melihat signifikan pengaruh belanja daerah (X) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Y). Variabel bebas dikatakan memiliki pengaruh terhadap variabel terikat, jika nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari pada nilai  $t_{tabel}$ . Berikut disajikan hasil perhitungan uji t menggunakan bantuan aplikasi SPSS.

**Tabel 2. Hasil Hipotesis Parameter Parsial (Uji-t) Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	772.854	185.894		4.158	.000
Belanja Daerah	.804	.257	.509	3.127	.004

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Output SPSS 16.0 (data diolah), 2022.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis parameter parsial (uji-t) pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Sumbawa Barat, diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3.127 dan nilai  $t_{tabel}$  pada derajat kebebasan ( $df=n-k=10-2=8$ ) dan  $\alpha = 5\%$  (0,05) adalah sebesar 2.306, sehingga nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari pada nilai  $t_{tabel}$  ( $3.127 > 2.306$ ). Sedangkan nilai signifikan yang dihasilkan adalah sebesar 0,004 lebih kecil dari 0,05 ( $0,004 < 0,05$ ). Hal ini berarti bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

### 3. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) dilakukan untuk melihat seberapa besar kontribusi variabel belanja daerah (X) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Y). Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai *Adjusted R-Square*. Nilai *Adjusted R-Square* semakin mendekati satu, maka variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Berikut disajikan hasil perhitungan koefisien determinasi ( $R^2$ ) menggunakan bantuan aplikasi SPSS.

**Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.509 <sup>a</sup>	.259	.232	150.20851

a. Predictors: (Constant), Belanja Daerah  
b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Output SPSS 16.0 (data diolah), 2022.

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi ( $R^2$ ) pengaruh variabel belanja daerah (X) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Y), diketahui nilai *R-Square* adalah sebesar 0,259. Hal ini berarti bahwa kemampuan variabel belanja daerah dalam mempengaruhi variasi perubahan variabel pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebesar 25,9%, sedangkan sisanya sebesar 74,1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar jangkauan penelitian ini.

## Pembahasan

Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran yang digunakan untuk melihat hasil dari kinerja pemerintah daerah dengan adanya desentralisasi. Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini diproksikan oleh PDRB yang dimana dengan peningkatan pembangunan ekonomi daerah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Faktor yang mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah belanja daerah. Untuk mendorong terciptanya sebuah pertumbuhan ekonomi daerah yang kondusif, salah satu komponen yang diandalkan adalah dengan belanja daerah.

Belanja Daerah merupakan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik dan pembangunan. Belanja Daerah digunakan untuk mendanai segala urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang telah diserahkan kepada kepala daerah masing masing. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih mendalam tentang pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Hubungan positif merupakan arah hubungan yang selaras. Artinya, semakin besar belanja daerah, maka pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Sumbawa Barat akan semakin meningkat. Namun demikian pula sebaliknya, semakin rendah belanja daerah, maka pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Sumbawa Barat juga akan semakin menurun.

Salah satu bagian penting dari pembangunan nasional adalah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat mengusahakan agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Pada negara yang sedang berkembang terus berusaha untuk meningkatkan pembangunan disegala bidang. Kebijakan pembangunan dalam APBD juga harus mengakomodasi aspirasi publik dan mengikutsertakan masyarakat secara langsung dalam bentuk keterlibatan publik dalam membangun daerah melalui proyek-proyek pembangunan dalam APBD. Pengeluaran pemerintah berkaitan erat dengan APBD karena secara langsung akan mempengaruhi penerimaan daerah dan pembiayaan-pembiayaan daerah, sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung.

Hasil penelitian ini selaras dengan pandangan Aryanto dan Handaka (2017) yang menyatakan bahwa belanja pemerintah merupakan belanja atau pengeluaran yang diperuntukkan bagi kepentingan publik dalam menumbuhkan perekonomian daerah dan meningkatkan kemampuan masyarakat. Belanja pemerintah fungsi ekonomi dalam kaitannya dengan pembangunan daerah ditujukan agar pembangunan ekonomi daerah dapat terwujud. Belanja pemerintah fungsi ekonomi salah satunya adalah belanja infrastruktur. Infrastruktur memiliki tiga peran penting bagi integrasi ekonomi yaitu: pertama, ketersediaan dari infrastruktur merupakan pemicu pertumbuhan ekonomi. Kedua, jaringan infrastruktur yang tersedia sangat penting dalam kelancaran aktivitas investasi dan perdagangan. Ketiga, untuk mengatasi adanya ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah. Infrastruktur yang baik mampu melancarkan mobilitas

perekonomian antar wilayah/daerah sehingga mampumenarik para investor untuk melakukan investasi di daerah dan berdampak pada terciptanya kesempatan kerja dan peningkatan kondisi pembangunan. Kondisi pembangunan yang meningkat akan berdampak pada pengentasan kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini didukung oleh temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siska Anggraini Putri dan Cahyono (2016) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah daerah diukur dari total belanja rutin dan belanja pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Pengeluaran pemerintah berkaitan erat dengan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) karena secara langsung akan mempengaruhi penerimaan daerah dan pembiayaan daerah, sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung. Semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang produktif, maka semakin memperbesar tingkat perekonomian disuatu daerah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Sumbawa Barat. kemampuan variabel belanja daerah dalam mempengaruhi variasi perubahan variabel pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebesar 25,9%, sedangkan sisanya sebesar 74,1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar jangkauan penelitian ini.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis ingin menyampaikan saran, yaitu sebagai berikut.

1. Agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang pertumbuhan ekonomi daerah dilakukan dengan cara membangun sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan ekonomi yang pada akhirnya memberikan peningkatan *output* pada daerah Sumbawa Barat serta meningkatkan belanja-belanja pada sektor-sektor pembangunan.
2. Pemerintah disarankan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien terutama dalam menyediakan barang dan jasa yang pihak swasta tidak dapat memproduksinya, melalui kebijaksanaan fiskal mengubah keadaan masyarakat serta membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan goncangan ekonomi yang berlebihan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2017). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aryanto, W., & Handaka, R.D. (2017). Analisis Pengaruh Belanja Modal, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Manajerial*, Vol. 2(2): 52-63.
- Ayumiati. (2017). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol. 7(2): 51-66.
- Biduri, S. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Sidoarjo: UMSIDA Press.



- Fatimah, S., & Hasbullah, Y. (2020). Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Product Domestic Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016-2019. *Jurnal Ekobis*, Vol. 6(2): 1-27.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IMB Statistik 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2016). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasan, M., & Azis, M. (2018). *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*. Makassar: CV. Nur Lina.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Putra, Z., Palisuri, P., & Cahyono. (2017). Analisis Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Luwu. *Jurnal Riset Unibos Makassar*, Vol. 3(3): 50-66.
- Putri, R.A., Zamzami, & Rahmadi, S. (2021). Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, Vol. 10(2): 107-122.
- Putri, S.A., & Cahyono, H. (2016). Pengaruh Belanja Daerah dan PMDN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, Vol. 4(3): 1-7.
- Sanusi, A. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (2015). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2018). *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suprianto, Pamungkas, B.D., Rahim, A., Usman, & Darmanto. (2020). Innovation Study in Improving the Quality of Planning and Budgeting Governance. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(1): 770-778.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Tjodi, A.M., Rotinsulu, T.O., & Kawung, G.M.V. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi (Studi di Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol. 19(4): 27-44.